

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal Januari tahun 2001, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan diberlakukannya Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal (dalam Priyo Hari Adi, 2006). Kedua undang-undang ini mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan Pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas, pemerintah daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar

pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil. Di samping itu, perlu diperhatikan juga peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Indra Bastian, 2005).

Penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Priyo Hari Adi, 2006). Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, berarti adalah urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus juga menjamin keserasian hubungan antar daerah dan

daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah. Otonomi Daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dalam mewujudkan tujuan negara (Indra Bastian, 2005).

Otonomi Daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dalam Priyo Hari Adi, 2006). Hakekat Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Juli Panglima Saragih, 2003 dalam Priyo Hari Adi, 2006). Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat yang kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Juli Panglima Saragih, 2003 dalam Priyo Hari Adi, 2006). Dampak krisis ekonomi ini mempengaruhi sektor anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni menjadi labilnya sektor pendapatan yang membawa dampak pula bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Akibatnya tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi tinggi pula.

Krisis ekonomi juga berpengaruh pada sektor perpajakan dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya krisis ekonomi akan berakibat menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat secara umum sehingga pada gilirannya berakibat pada terganggunya pendapatan pemerintah daerah. Hal ini dapat berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh

pada pendapatan (penerimaan) dan belanja (pengeluaran) daerah (Abdul Halim, 2001). Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan pada daerah yang tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rendah. Dengan PAD yang rendah akan semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (Abdul Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal, dengan membangun berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) dalam Priyo Hari Adi (2006), menunjukkan bahwa penggunaan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung

pada peningkatan kemandirian daerah. Karena alasan inilah maka peneliti ingin mengetahui bagaimana ”**Pengaruh Belanja Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening setelah Diberlakukannya Otonomi Daerah pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan berikut ini:

1. Apakah belanja pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur setelah otonomi daerah?
2. Apakah belanja pembangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur setelah otonomi daerah?
3. Apakah belanja pembangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur setelah otonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris bahwa:

1. Belanja pembangunan berpengaruh terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur setelah otonomi daerah.

2. Belanja pembangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur setelah otonomi daerah.
3. Belanja pembangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur setelah otonomi daerah.



D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh dalam dunia nyata

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dan pendapatan asli daerah setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori konseptual yang terkait dengan objek penelitian, seperti: akuntansi sektor publik, anggaran sektor publik, anggaran pendapatan belanja daerah, akuntansi belanja daerah, peranan belanja pembangunan dalam desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan daerah bagi kemandirian daerah, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual atau model penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, dikemukakan pula keterbatasan dalam penelitian dan pemberian saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya